

**ANALISIS PRILAKU KONSUMSI RUMAH TANGGA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Saefullah, Tono

Iful73bone@gmail.co. thonos93@gmail.com

Abstract

The research discusses the consumption behaviour of State Civil Servants of Youth and Sports Institution of South Sulawesi, whether it is accordance with the objectives of the shari'a?. The problem is focussed on two things : (1) The level of APC and MPC on physical consumption, the payment of zakat and other worship of state civil servants of Youth and Sports Institution of South Sulawesi, and (2) The shar'ia level of personal main consumption behaviour (E_1) and worship (E_2) which is measured with consumption model of Fahim Khan.

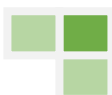
In discussing the above problem, the research method used is quantitative with Islamic macroeconomic approach. The data needed, collected by using observation method, questionnaire, and documentation. The data collected by using the method, are analysed with the consumption method of Keynes and Fahim Khan. Both of them are harmonized to get maximum results.

The results of this research show that the APC and MPC level of the State Civil Servants of Youth and Sports Institution of South Sulawesi are : (1) For the physical consumption, the income level of Civil state servants grade II is Rp. 5.163.412, the MPC value is 0,59 and the APC value is 0,88. The income level of grade III is Rp. 7.009.624, the MPC value is 0,51 and the APC value is 0,79. (2) For the zakat payment of all income level, the APC and MPC value is constant, 0,03. (3) For other worship consumption, the income level of grade II is Rp. 5.163.412, the MPC value is 0,42 and the APC value is 0,08. The income level of grade III is Rp. 7.009.624, the MPC value is 0,42 and the APC value is 0,10. The income level of grade IV is Rp. 9.225.501, the MPC value is 1,52 and the APC value is 0,14. While the level of basic consumption (a_0) of personal consumption (E_1) and worship (E_2) of the Civil State Servants of Youth and Sports Institution of South Sulawesi, in which, if measured with consumption model of Fahim Khan, then the results obtained is : grade II is Rp. 5.163.412, E_1 value is Rp. 1.528.142 and E_2 value is Rp. 541.406. The income level of grade III is Rp. 7.009.624, E_1 value is Rp. 2.439.513 and E_2 value is Rp. 843.189. The income level of grade IV is 9.225.501, E_1 value is Rp. 2.576.611 and E_2 value is 1.514.778.

Abtrak

Penelitian ini membahas tentang perilaku konsumsi rumah tangga PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sudah sesuai dengan tujuan syariat? Permasalahan ini difokuskan pada dua hal yaitu: (1) Tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik, pembayaran zakat dan ibadah lain PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dan (2) Kesyariahan perilaku konsumsi pokok pribadi (E_1) dan ibadah (E_2) PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesiyang diukur dengan model konsumsi Fahim Khan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan ekonomi makro Islam. Data yang dibutuhkan, dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi,



angket, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui metode tersebut dianalisis dengan model konsumsi Keynes dan Fahim Khan. Keduanya diharmonisasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat APC dan MPC PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: (1) Untuk konsumsi fisik, pada tingkat pendapatan PNS Golongan II sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya 0,59 dan nilai APC-nya 0,51 dan nilai APC-nya 0,86. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya 0,51 dan nilai APC-nya 0,79. (2) Untuk pembayaran zakat, pada semua tingkatan pendapatan, nilai APC dan MPC-nya konstan, yakni 0,03. (3) Untuk konsumsi ibadah lain, pada tingkat pendapatan PNS Golongan II sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya 0,42 dan nilai APC-nya 0,08. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya 0,42 dan nilai APC-nya 0,10. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya 1,52 dan nilai APC-nya 0,14. Sedangkan, tingkat konsumsi pokok (a_0) pada konsumsi pribadi (E_1) dan ibadah (E_2) PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan jika diukur dengan model konsumsi Fahim Khan, maka didapatkan hasil, yakni: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II sebesar Rp. 5.163.412, nilai E_1 -nya Rp. 1.528.142 dan nilai E_2 -nya Rp. 541.406. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III sebesar Rp. 7.009.624, nilai E_1 -nya Rp. 2.439.513 dan nilai E_2 -nya Rp. 843.189. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV sebesar Rp. 9.225.501, nilai E_1 -nya Rp. 2.576.611 dan nilai E_2 -nya Rp. 1.514.778.

Kata Kunci : Perilaku, Pendapatan, Tingkat, Konsumsi, APC, MPC, PNS.

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha peningkatan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui kegiatan ekonomi. Dalam peningkatan pendapatan (pendapatan perkapita) dalam mengembangkan pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam memberikan kesempatan kerja bagi setiap masyarakat adalah suatu keadilan yang merupakan kegiatan dalam mengurangi perbedaan bagi perkembangan pembangunan dalam membangun kemakmuran antar daerah guna meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai ukuran kemajuan ekonomi, sering digunakan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau pendapatan perkapita.¹

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor adalah suatu

¹Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, (Vol. IV, No. 7, 2013), h. 33.



pertumbuhan ekonomi yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi.²

Menurut Keynes sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono, orang harus bersedia meninggalkan ideologi *laissez faire* yang murni terkandung dalam pemikiran Klasik untuk menolong sistem perekonomian suatu negara. Keynes berpendapat bahwa pemerintah wajib melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif dan sadar untuk mempengaruhi gerak perekonomian dalam kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi yang masih tetap bisa dipercayakan kepada pengusaha-pengusaha swasta. Keynes tidak percaya pada sistem *laissez faire* untuk mengkoreksi diri sendiri dalam kembali ke posisi “*full employment*”. Menurutnya *full employment* hanya bisa dicapai dengan tindakan terencana, bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Untuk lebih jelasnya, Keynes menjelaskan sebagai berikut:³

Kemungkinan Kelebihan Produksi. Menurut Keynes kelebihan produksi secara umum bisa terjadi apabila permintaan masyarakat akan barang/jasa tidak cukup kuat. *Supply* yang ditawarkan tidak cukup untuk menyerap *Demand* yang ada. Keynes mengatakan bahwa permintaan efektif tidak muncul dari penghasilan yang tidak dibelanjakan oleh sektor rumah tangga dalam hal ini penghasilan yang ditabung pada lembaga keuangan. Penghasilan yang ditabung pada lembaga keuangan dapat meningkatkan permintaan efektif di pasar barang apabila lembaga keuangan meminjamkan kepada sektor produsen untuk pembiayaan investasi mereka.

Semua barang yang diproduksi namun tidak terjual habis dalam suatu periode, ada dua akibat yang dapat ditimbulkan, yakni: (1) produsen akan mengurangi produksi mereka untuk periode berikutnya dan ini akan mengakibatkan GDP dalam periode berikutnya turun; (2) harga barang akan turun karena banyaknya persediaan yang masih tersedia. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan biasa, harga akan cenderung untuk turun apabila permintaan lebih kecil dari penawaran. Turunnya harga barang yang cukup fleksibel ke bawah sangat berpengaruh pada GDP akibat kekurangan permintaan. Pada kenyataannya, meskipun kelebihan produksi, ada sebagian barang/jasa yang harganya sulit untuk turun. Jika demikian halnya, penurunan produksi (GDP) pada periode berikutnya diakibatkan oleh kekurangan permintaan efektif. Apabila harga cukup fleksibel ke bawah, permintaan akan barang-barang tersebut mulai naik kembali jika harga akan turun cukup jauh. Jadi, kalau harga cukup fleksibel, meskipun harga

²Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Ed. VII; Jil. 1; t.c; Jakarta: Erlangga, 2000), h. 20.

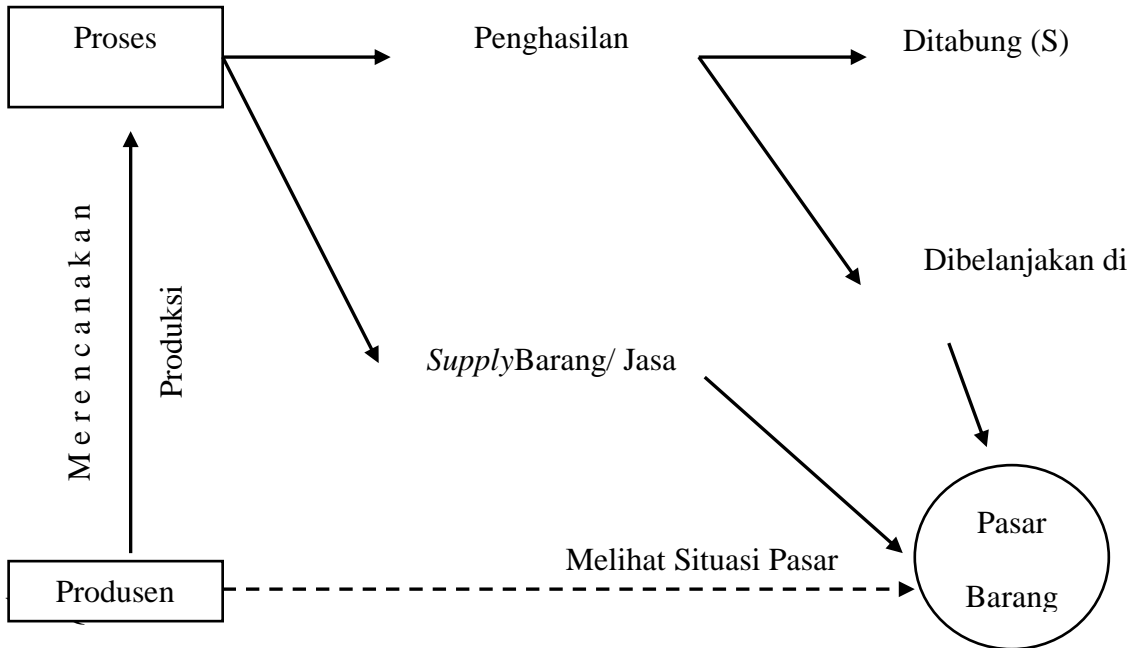
³Boediono, *Ekonomi Makro*, (Edisi Keempat; Cet. XXIX; Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2018), h. 32-35.



Anggap saja untuk sementara perekonomian yang digunakan yakni perekonomian tertutup (tidak melakukan transaksi dengan luar negeri). Permintaan agregat atau pengeluaran agregat secara keseluruhan (kita sebut Z), terdiri atas tiga unsur, yakni: (a) permintaan efektif atas barang-barang konsumsi dari rumah tangga (kita sebut C); (b) permintaan efektif untuk investasi dari sektor produsen (kita sebut I); dan (c) permintaan efektif pemerintah (G). maka $Z = C + I + G$.⁴

Berdasarkan formulasi di atas, disebutkan setiap proses produksi mempunyai akibat ganda. Di satu pihak, menghasilkan *supply* atau penawaran dari proses produksi barang/jasa yang siap untuk dipasarkan di pasar barang. Di pihak lain, pendapatan yang diperoleh dari proses penawaran barang dan jasa di pasar barang digunakan untuk pembayaran upah untuk tenaga kerja, bayar sewa untuk tanah, bunga untuk pemilik modal dan keuntungan untuk mitra kerja. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga) diperoleh dari proses produksi. Selanjutnya, pendapatan menimbulkan permintaan efektif dalam pasar barang. Menurut Keynes, tidak semua penghasilan tersebut akan dibelanjakan untuk barang dan jasa, biasanya 10% - 20% penghasilannya akan ditabung dan 80%-90% dari penghasilannya digunakan untuk kegiatan konsumsi. Proses tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Pasar Barang



$Y = C + S$
 $Q > C$

⁴Boediono, *Ekonomi Makro*, h. 36.

Keynes berpendapat bahwa setiap masyarakat menggunakan pendapatan rumah tangga mereka untuk dibelanjakan berupa barang dan jasa (C) dan sebagian dari pendapatannya ditabung (S). Di sebagian negara, semakin tinggi penghasilannya, maka semakin tinggi pula kesempatannya untuk menabung sebagian penghasilannya. Dengan kata lain, persentase dari penghasilan yang dibelanjakan relatif rendah, sekitar 60%-70% dan 30%-40% digunakan untuk tabungan. Hal ini sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan (kehidupan sehari-hari) bahwa semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar pula bagian dari penghasilan yang dipisahkan untuk ditabung untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan makanan, pakaian dan sebagainya di masa yang akan datang. Dari penghasilan yang dibelanjakan maupun yang ditabung di suatu masyarakat merupakan suatu perilaku ekonomi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam mengalokasikan penghasilan yang mereka dapatkan, persentase ini disebut dengan kecenderungan untuk menabung atau dengan istilah *marginal propensity to save*. Sedangkan persentase dari penghasilan yang dibelanjakan disebut kecenderungan untuk berkonsumsi atau dengan istilah *propensity to consume*. Jika “s” adalah *marginal propensity to save* dan “c” *propensity to consume*, maka:⁵

$$S = sY$$

$$C = cY$$

$$C + S = cY = (c + s)Y = Y$$

$$c + s = I$$

Ada berbagai versi fungsi konsumsi yang diajukan oleh para ekonom. Bentuk fungsi konsumsi di atas adalah yang paling sederhana. Bentuk sederhana yang lain yakni $C = a + cY$, di mana “a” menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi minimal. Khusus konsumsi jangka pendek, diberikan formulasi $C = a + cY$, *propensity to consume* perlu dibedakan menjadi dua macam, yakni:⁶

- (a) *Marginal propensity to consume* (MPC) didefinisikan sebagai perubahan pengeluaran konsumsi yang terjadi akibat perubahan tingkat pendapatan, atau $\Delta C / \Delta Y$, atau c;
- (b) *Average propensity to consume* (APC), yang didefinisikan sebagai suatu bagian penghasilan yang dibelanjakan untuk konsumsi rumah tangga, atau

$$\frac{C}{Y} = \frac{a + cY}{Y} = \frac{a}{Y} + c$$

Bagi fungsi konsumsi jangka panjang, tentu saja $MPC = APC = c$.

⁵Boediono, *Ekonomi Makro*, h. 37-38.

⁶Boediono, *Ekonomi Makro*, h. 39.



Ada dua hal yang menjadi perhatian dari fungsi konsumsi di atas, yakni: *Pertama*, MPC seharusnya mempunyai nilai antara 0 dan 1. *Kedua*, fungsi konsumsi tersebut tidak menunjukkan perilaku konsumen individual seperti fungsi permintaan mikro melainkan menunjukkan perilaku konsumsi makro dari semua konsumen (sektor rumah tangga) dalam suatu negara/daerah. C menunjukkan pengeluaran tentang konsumsi total dinyatakan dalam rupiah dan Y adalah pendapatan total masyarakat dalam hal ini (GDP, GNP, Pendapatan Nasional maupun *Disposable Income*, tergantung mana kecocokan masing-masing negara/daerah).

Lain halnya dengan Fahim Khan, Menurut beliau pendidikan, agama (kepercayaan), pengaruh lingkungan sosial sekitar, budaya, adat dan juga tradisi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan pengambilan keputusan (*decisions making*) seseorang dalam menentukan perilaku konsumsinya.⁷ Lanjut, beliau membagi tingkat pendapatan masyarakat (1) pendapatan di atas nisab (Y_u) dan (2) pendapatan di bawah nisab (Y_L). Komponen pengeluaran konsumen dibagi 2 : (1). Konsumsi untuk kebutuhan sendiri (E_1) dan 2. Konsumsi untuk keridhaan Allah seperti zakat sedekah infak (E_2). Maka dihasilkan fungsi konsumsi : $C^* = A_0 + A_u Y_u$. Jika dikombinasikan dengan persamaan konsumsi Keynes diperoleh: (1). Pendapatan di atas nisab : $C = a_0 + E_2 + a_1 (Y_u - E_2)$; (2). Pendapatan dibawah nisab (maka E_2 tidak ada) : $C = a_0 + a_1 Y_u$.⁸

Perilaku konsumsi itu sendiri mencerminkan bagaimana sikap seseorang dalam menghabiskan suatu barang maupun jasa. Andi Mappiere, menjelaskan bahwa proses pengamatan, penilaian dan pengambilan keputusan merupakan cerminan dari segala tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Kemudian Saifuddin Azwar menambahkan bahwa perilaku manusia dapat bereaksi yang sifatnya sederhana maupun yang bersifat kompleks yang dipandang dari sudut pandang psikologi.¹⁰

Perilaku konsumsi setiap manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu pun dengan instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ratusan pegawai negeri sipil, antara PNS yang satu dengan PNS yang lain memiliki pengeluaran untuk konsumsi dari setiap tahunnya berbeda dengan pengeluaran saat ini. Hal ini

⁷M. Fahim Khan, "An Alternative Approach to Analysis of Consumer Behavior: Need for Distinctive "Islamic" Theory", *Journal of Islamic Business and Management*, (Vol. 3, No. 2, 2013), h. 15.

⁸M. Fahim Khan, "An Alternative Approach to Analysis...", h. 15

⁹Andi Mappiere, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, (t.c; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 40.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. (t.c; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 9.



disebabkan kebutuhan setiap individu dapat meningkat dari seiring berjalannya waktu. Besarnya jumlah penghasilannya, banyaknya anggota keluarga, status sosial, naiknya tingkat harga barang dan jasa untuk kebutuhan hidup merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah pengeluaran seseorang untuk konsumsi.¹¹

Untuk mencapai tujuan syariat, pengeluaran seseorang dalam konsumsi Islam harus mengutamakan kebutuhan pokoknya. Setidaknya terdapat tiga kebutuhan pokok yakni: (1) kebutuhan primer, yakni nafkah pokok bagi manusia yang menjadi dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebutuhannya sesuai tujuan syariat dalam hal ini memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan kehormatan). (2) kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia yang merupakan kebutuhan tambahan dalam mempermudah kehidupannya agar terhindar dari kesulitan dan hidup sejahtera. (3) kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer maupun sekunder terpenuhi guna menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.¹²

Dalam mewujudkan lima tujuan syariat tersebut di atas, Meski seorang muslim dapat memenuhi kebutuhan ketiga (pelengkap), Islam tetap tidak menganjurkan melakukan kegiatan konsumsi secara berlebih-lebihan yang terkesan mewah karena dapat mendatangkan kerusakan. Seorang muslim harus disiplin dalam menentukan pengeluaran konsumsi rumah tangganya sesuai skala prioritas kebutuhannya, berdasar pada pendapatan yang diperolehnya.

Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dapat mewujudkan lima tujuan syariah dalam memenuhi setiap kegiatan konsumsinya maka akan tercipta keseimbangan aktifitas di Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Atas dasar ini maka permasalahan yang akan muncul, apakah tingkat konsumsi rumah tangga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tujuan syariah. Masalah ini perlu dikaji lebih lanjut karena jika tingkat konsumsi mereka sesuai dengan tujuan syariah maka hal ini dapat menentukan keseimbangan aktivitas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, di mana implikasinya dapat meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil.

¹¹William A. McEachern, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*, Terj. Oleh Sigit Triandaru dari Judul Asli: *Economics: a Contemporary Introduction* (t.c; Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 64.

¹²Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), h. 39-40.



B. Meotodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu sebuah penelitian yang menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan alat analisis statistik.¹³ Dalam penelitian ini, jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik, pembayaran zakat, dan ibadah lain PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi makro Islam karena mengidentifikasi tiga komponen yang nyata, yaitu: (1) Penyelidikan atas tujuan syariah terkait dengan tingkat APC dan MPC PNS Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Pengidentifikasian dalam menginterpretasikan masalah (*public good*) dan kebaikan (*hasan*) dalam mengkaji tingkat APC dan MPC PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Penyelidikan untuk mentransformasikan apa yang masuk dan apa yang seharusnya (*what is into, what should be*) pada tingkat APC dan MPC PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

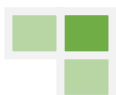
Jika demikian adanya, maka hal-hal tersebut diatas akan memberi peluang individu sebagai sumber informasi penelitian untuk melakukan interpretasi, selanjutnya peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi tersebut untuk mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang dilakukan.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dilingkungan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebanyak 129 orang PNS. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Populasi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 4.



GOLONGAN PNS	JUMLAH PNS
Golongan IV	13
Golongan III	69
Golongan II	47
TOTAL POPULASI	129

Sumber: Dokumen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sul-Sel, 2018.

Dalam penelitian ini, *Proportionate Stratified Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti. Sugiyono menyatakan bahwa *Proportionate Stratified Random Sampling* digunakan bila populasi mempunyai anggota yang berstrata secara proporsional dan mempunyai unsur yang tidak homogen.¹⁴

Dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penentuan jumlah sampel dengan menggunakan Rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, diambil total populasi sejumlah 129 PNS sebagaimana yang dikemukakan Riduwan, yakni:¹⁵

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = sampel

N = populasi

d = Presisi 90%

Berdasarkan rumus pengambilan sampel diatas, maka dapat ditentukan sampel yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (t.c; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 128.

¹⁵Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, (t.c; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65

Sedangkan perhitungan jumlah sampel untuk tiap golongan PNS mengacu pada buku Sugiyono, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:¹⁶

$$n = \frac{nD}{nT} \times S$$

Keterangan:

- P = Proporsi sampel tiap golongan
- nD= Jumlah PNS tiap golongan
- nT = Total populasi
- S = Jumlah sampel yang diambil

Berdasarkan rumus perhitungan jumlah sampel untuk tiap golongan di atas, maka dapat ditentukan sampel yang akan digunakan per golongan yakni sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perhitungan Jumlah Sampel Per Golongan
Rumus $nD / Nt \times S$

Golongan	Jumlah PNS	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Sampel Per Golongan
Golongan 4	13	129	56	5,64 dibulatkan menjadi 6
Golongan 3	69	129	56	29,95 dibulatkan menjadi 30
Golongan 2	47	129	56	20,40 dibulatkan menjadi 20

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan terhadap

¹⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", h. 130.



objek penelitian. Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku terhadap suatu proses atau objek berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁹ Instrumen observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai perilaku konsumsi rumah tangga PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data).

b. Angket atau Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik yang efisien digunakan dalam penelitian kuantitatif karena peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis lengkap dengan jawabannya untuk diisi oleh informan. Selain itu, kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar.¹⁷ Jenis angket yang digunakan peneliti untuk responden tersebut adalah angket tertutup dimana jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih lalu mengisi angketnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen yang digunakan dalam memperoleh bukti nyata yang bisa dijadikan sebagai informasi pasti. Dokumentasi dapat berupa gambar, foto, prasasti, naskah dari hasil percetakan atau sebuah rekaman, artikel, brosur, dan lain-lain.¹⁸

Deddy Mulyana menyatakan bahwa, suatu dokumen dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri.¹⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku konsumsi rumah tangga pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

¹⁹Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 93.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 142.

¹⁸Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 138.

¹⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 195.



5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Content Analysis* dan *Mathematic Descriptive Analysis*. Muhajir menjelaskan bahwa *Content Analysis* adalah suatu upaya untuk menganalisis isi suatu teks untuk menentukan suatu kriteria dan membuat prediksi kandungan dalam teks tersebut. Teks dapat berupa kata-kata, pesan, simbol, makna gambar, gagasan, tema dan lain sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini, *Content Analysis* digunakan untuk menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumen yang terkait dengan tingkat perilaku konsumsi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun teknik *Mathematic Descriptive Analysis* merupakan upaya menarik realitas itu ke permukaan tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu secara matematis yang digambarkan melalui berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner dengan langkah-langkah yaitu:

1. Melakukan deksripsi terhadap karakteristik PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Melakukan deksripsi terhadap tingkat pendapatan dan konsumsi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Melakukan perhitungan tingkat pendapatan dan komsumsi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dan hubungannya keduanya untuk menguji hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini. Hipotesis diuji dengan model konsumsi Keynes dan persamaan matematisnya seperti di bawah ini:

$$C = a + bY, a = (APC - MPC) Y, b = MPC = \Delta C / \Delta Y, APC = C / Y.$$

4. Hasil uji hipotesis dikonfirmasi dengan model konsumsi Fahim Khan dengan persamaan matematis: $C = (a_0 + E_2) + a_1 (Y_u - E_2)$ untuk memastikan kesyariahan perilaku konsumsi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Terakhir melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

²⁰Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.c; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68-69.

²¹Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (t.c; Jakarta: LP3ES, 2003), h. 68.



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Gambaran tentang karakteristik dari 56 responden yang memberikan jawaban secara utuh atas angket penelitian yang diberikan kepada mereka mengenai jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, lama bekerja dan jumlah tanggungan, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin

Gambaran tentang distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin dapat disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	33	58,9
2.	Perempuan	23	41,1
	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan 58,9% responden penelitian adalah laki-laki dan 41,1% adalah perempuan. Keadaan ini menggambarkan bahwa PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan lebih didominasi oleh laki-laki.

2. Distribusi Frekuensi Responden menurut Umur

Gambaran tentang distribusi frekuensi responden menurut umur dapat disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Umur	Frekuensi	%
1	20 an tahun (20 – 29)	2	3,6
2	30 an tahun (30 – 39)	22	39,3
3	40 an tahun (40 – 49)	19	33,9
4	50 an tahun (50 – 29)	13	23,2
	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.



Tabel di atas menunjukkan 3,6% responden penelitian berumur 20-29 tahun, 39,3% berumur 30-39 tahun, 33,9% berumur 40-49 tahun, dan 23,2% responden berumur 50-59 tahun. Keadaan ini menggambarkan bahwa PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan lebih didominasi oleh pegawai yang berusia 40-49 tahun.

3. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan

Gambaran tentang distribusi frekuensi responden menurut pendidikan dapat disajikan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD/MI	0	0
2	SMP/MTs	0	0
3	SMA/MA/SMK	31	55,3
4	DIPLOMA: D.I/D.II/D.III/D.IV	2	3,6
5	SARJANA: S.1/S.2/S.3	23	41,1
	Total	56	100

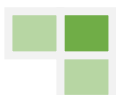
Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan 0% responden penelitian berpendidikan SD/MI dan SMP/MTs, 55,3% berpendidikan SMA/MA/SMK, 3,6% berpendidikan Diploma: D.I/D.II/D.III/D.IV, dan terakhir 41,1% berpendidikan Sarjana: S.1/S.2/S.3. Keadaan ini menggambarkan bahwa PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya berlatar pendidikan Sarjana: S.1/S.2/S.3, artinya sumber daya manusia PNS yang mengelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah orang-orang berkualitas dan profesional.

4. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Masa Kerja

Gambaran tentang distribusi frekuensi responden menurut masa kerja dapat disajikan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Masa Kerja



No	Masa Kerja	Frekuensi	%
1	1-5 tahun	6	10,7
2	6-10 tahun	31	55,4
3	11-15 tahun	4	7,1
4	16-20 tahun	3	5,4
5	21 tahun ke atas	12	21,4
	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

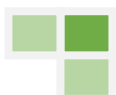
Tabel di atas menunjukkan 10,7% responden penelitian dengan masa kerja 1-5 tahun, 55,4% responden penelitian dengan masa kerja 6-10 tahun, 7,1% responden penelitian dengan masa kerja 11-15 tahun, 5,4% responden penelitian dengan masa kerja 16-10 tahun, 21,4% responden penelitian dengan masa kerja 21 tahun ke atas. Keadaan ini menggambarkan bahwa PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan selalu memberikan kesempatan kepada mereka yang hendak mengembangkan karirnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan utamanya kepada generasi muda, dan di sisi lain Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak pernah menghalangi para pegawainya jika mereka hendak mengembangkan karirnya sendiri.

5. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jumlah Tanggungan

Gambaran tentang distribusi frekuensi responden menurut jumlah tanggungan dapat disajikan pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jumlah Tanggungan

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi	%
1	1 Orang	30	53,5
2	2 Orang	10	17,9



3	3 Orang	8	14,3
4	4 Orang	6	10,7
5	5 Orang	1	1,8
6	6 Orang	0	0
7	7 Orang	1	1,8
8	8 Orang	0	0
9	9 Orang	0	0
10	10 Orang	0	0
	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan 53,5% responden memiliki 1 orang tanggungan, 17,9% responden memiliki 2 orang tanggungan, 14,3% responden memiliki 3 orang tanggungan, 10,7% responden memiliki 4 orang tanggungan, 1,8% responden memiliki 5 orang tanggungan, 0% responden memiliki 6 orang tanggungan, 1,8% responden memiliki 7 orang tanggungan, dan 0% responden memiliki 8, 9, 10. Keadaan ini menggambarkan bahwa PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak yang hanya memiliki 1 orang tanggungan.

2. Deskripsi Pendapatan dan Konsumsi Responden Penelitian

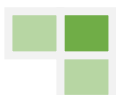
Gambaran tentang rata-rata tingkat pendapatan dan konsumsi dari 56 responden yang memberikan jawaban secara utuh atas angket penelitian yang diberikan kepada mereka mengenai tingkat pendapatan, konsumsi fisik, pengeluaran zakat dan konsumsi ibadah lainnya, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan Pokok Responden 2016-2017

Gambaran tentang distribusi frekuensi rata-rata tingkat pendapatan pokok responden tahun 2016 dan 2017 dapat disajikan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Distribusi Rata-Rata Tingkat Pendapatan Pokok Responden 2016-2017



No	Rata-rata Pendapatan Pokok 2016			Rata-rata Pendapatan Pokok 2017		
	Per Bulan	Frekuensi	%	Per Bulan	Frekuensi	%
1	Di bawah 1 juta	0	0	Di bawah 1 juta	0	0
2	Di atas 1 juta s.d. 5 juta	56	100	Di atas 1 juta s.d. 5 juta	56	100
3	Di atas 5 juta s.d. 10 juta	0	0	Di atas 5 juta s.d. 10 juta	0	0
4	Di atas 10 juta	0	0	Di atas 10 juta	0	0
	Total	56	100	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan pokok responden di bawah 1 juta pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap 0%, pendapatan pokok responden di atas 1 juta s.d. 5 juta pada tahun 2016 sebanyak 100% dan tahun 2017 tetap sebanyak 100%, pendapatan pokok responden di atas 5 juta s.d. 10 juta pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap sebanyak 0%, dan pendapatan pokok responden di atas 10 juta pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap sebanyak 0%.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan pangkat atau golongan.

2. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan Sampingan Responden 2016-2017

Gambaran tentang distribusi frekuensi rata-rata tingkat pendapatan sampingan responden tahun 2016 dan 2017 dapat disajikan pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Distribusi Rata-Rata Tingkat Pendapatan Pokok Sampingan 2016-2017

No	Rata-rata Pendapatan Sampingan 2016			Rata-rata Pendapatan Sampingan 2017		
	Per Bulan	Frekuensi	%	Per Bulan	Frekuensi	%
1	Di bawah 1 juta	0	0	Di bawah 1 juta	0	0

2	Di atas 1 juta s.d. 5 juta	56	100	Di atas 1 juta s.d. 5 juta	56	100
3	Di atas 5 juta s.d. 10 juta	0	0	Di atas 5 juta s.d. 10 juta	0	0
4	Di atas 10 juta	0	0	Di atas 10 juta	0	0
	Total	56	100	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan sampingan responden di bawah 1 juta pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap 0%, pendapatan sampingan responden di atas 1 juta s.d. 5 juta pada tahun 2016 sebanyak 100% dan tahun 2017 tetap sebanyak 100%, pendapatan sampingan responden di atas 5 juta s.d. 10 juta pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap sebanyak 0%, dan pendapatan sampingan responden di atas 10 juta pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap sebanyak 0%.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan sampingan PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menerima pendapatan sampingan secara tetap.

3. Distribusi Frekuensi Konsumsi Fisik Responden 2016-2017

Gambaran tentang distribusi frekuensi rata-rata tingkat konsumsi fisik responden (yakni: barang tahan lama, barang tidak tahan lama, makanan, tanggungan, tagihan, pajak, asuransi, dan pengeluaran lain) tahun 2016 dan 2017 dapat disajikan pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10

Distribusi Rata-Rata Tingkat Konsumsi Fisik Responden 2016-2017

No	Rata-rata Konsumsi Fisik 2016			Rata-rata Konsumsi Fisik 2017		
	Per Bulan	Frekuensi	%	Per Bulan	Frekuensi	%



1	1% s.d. 29%	0	0	1% s.d. 29%	0	0
2	30% s.d. 49%	0	0	30% s.d. 49%	0	0
3	50% s.d. 69%	1	1,8	50% s.d. 69%	3	5,3
4	70% s.d. 89%	36	64,3	70% s.d. 89%	45	80,4
5	90% s.d. 100%	19	33,9	90% s.d. 100%	8	14,3
Total		56	100	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi fisik responden yakni 1% s.d. 29% pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan, tetap 0%, konsumsi fisik responden 30% s.d. 49% pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap 0%, konsumsi fisik responden 50% s.d. 69% pada tahun 2016 sebanyak 1,8% dan tahun 2017 menjadi 5,3%, konsumsi fisik responden 70% s.d. 89% pada tahun 2016 sebanyak 64% dan tahun 2017 menjadi sebanyak 80,4%, konsumsi fisik responden 90% s.d. 100% pada tahun 2016 sebanyak 33,9% dan tahun 2017 sebanyak 14,3%.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi fisik PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat konsumsi fisik responden 70% s.d. 89% dan pada tingkat konsumsi fisik responden 90% s.d. 100% dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan karena pengaruh dari tingkat pendapatannya yang mengalami peningkatan. Artinya, jika tingkat pendapatan mereka naik, maka tingkat konsumsi fisik mereka, yakni barang tahan lama, barang tidak tahan lama, makanan, tanggungan, tabungan, investasi, tagihan, pajak, asuransi, dan pengeluaran lain akan naik pula.

4. Distribusi Frekuensi Pembayaran Zakat Responden 2016-2017

Gambaran tentang distribusi frekuensi rata-rata tingkat pembayaran zakat responden (yakni: zakat maal) tahun 2016 dan 2017 dapat disajikan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11

Distribusi Rata-Rata Tingkat Pembayaran Zakat Responden 2016-2017

No	Rata-rata Pembayaran Zakat 2016		Rata-rata Pembayaran Zakat 2017	
	Per Bulan	Frekuensi %	Per Bulan	Frekuensi %



1	Bayar Zakat	53	94,6	Bayar Zakat	53	94,6
2	Tidak Bayar Zakat	3	5,4	Tidak Bayar Zakat	3	5,4
Total		56	100	Total	56	100

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pembayaran zakat maal responden pada tahun 2016 sebanyak 94,6% PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan membayar zakat dan sebanyak 5,4% PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak membayar zakat dan tahun 2017 tetap sebanyak 94,6% PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan membayar zakat dan sebanyak 5,4% PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak membayar zakat.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap saudara-saudara mereka yang kurang mampu, hal ini terlihat dari banyaknya PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang membayar zakat maal yakni 94,6%.

5. Distribusi Frekuensi Konsumsi Ibadah Lain Responden 2016-2017

Gambaran tentang distribusi frekuensi rata-rata tingkat konsumsi ibadah lain responden (yakni: infaq & shadaqah, haji & umrah, ibadah murni lain, ibadah sosial lain) tahun 2016 dan 2017 dapat disajikan pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Distribusi Rata-Rata Tingkat Konsumsi Ibadah Lain Responden 2016-2017

No	Rata-rata Konsumsi Ibadah Lain 2016			Rata-rata Konsumsi Ibadah Lain 2017		
	Per Bulan	Frekuensi	%	Per Bulan	Frekuensi	%
1	1% s.d. 29%	56	100	1% s.d. 29%	55	98,2
2	30% s.d. 49%	0	0	30% s.d. 49%	1	1,8
3	50% s.d. 69%	0	0	50% s.d. 69%	0	0
4	70% s.d. 89%	0	0	70% s.d. 89%	0	0
5	90% s.d. 100%	0	0	90% s.d. 100%	0	0

<i>Total</i>	56	100	<i>Total</i>	56	100
--------------	----	-----	--------------	----	-----

Sumber: Data primer diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi ibadah lain responden yakni 1% s.d. 29% pada tahun 2016 sebanyak 100% dan tahun 2017 konsumsi ibadah lain sebanyak 98,2%, konsumsi ibadah lain responden 30% s.d. 49% pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 konsumsi ibadah lain responden sebanyak 1,8%, konsumsi ibadah lain responden 50% s.d. 69% pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 sebanyak 0%, konsumsi ibadah lain responden 70% s.d. 89% pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap sebanyak 0%, konsumsi ibadah lain responden 90% s.d. 100% pada tahun 2016 sebanyak 0% dan tahun 2017 tetap sebanyak 0%.

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi ibadah lain PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada setiap tahunnya tingkat konsumsi ibadah lain 1% s.d. 29% sebesar 100% pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami perubahan menjadi 98,2%, pada rata-rata tingkat konsumsi ibadah lain 30% s.d. 49%, sebesar 0% pada tahun 2016, namun pada 2017 mengalami perubahan menjadi 1,8%, pada rata-rata tingkat konsumsi ibadah lain 50% s.d. 69%, 70% s.d. 89%, dan 90% s.d. 100% tetap sama yakni 0%. Jika tingkat pendapatan mereka naik, maka tingkat konsumsi ibadah lain mereka, yakni infaq & shadaqah, haji dan umrah, ibadah murni lain, ibadah sosial lain, akan naik. Jika demikian adanya, maka PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya dimotivasi aspek konsumsi fisik dalam bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi juga aspek pengeluaran zakat maal dan konsumsi ibadah lainnya.

3. Tingkat APC dan MPC PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk mengetahui tingkat APC dan MPC PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada konsumsi fisik, konsumsi ibadah lainnya (selain *zakat maal*) dan pengeluaran zakat (*zakat maal*) mereka, digunakan model konsumsi Keynes. Persamaan matematisnya, yaitu: $C = a + bY$, $a = (APC - MPC) y$, $b = MPC = \Delta C / \Delta Y$, $APC = C / Y$. Hasil perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Fisik

a. PNS Golongan II

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik PNS Golongan II



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Fisik PNS Golongan II
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Pendapatan		Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan II						
		Konsumsi Fisik		APC-KF	MPC-KF	Basic-KF	Marginal-KF	Total-KF
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Keseluruhan								
150.779.960	154.902.360	135.868.242	136.927.230	26,52	17,63	45.844.249	91.082.981	136.927.230
								30
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Rata-Rata								
5.025.999	5.163.412	4.528.941	4.564.241	0,88	0,59	1.528.142	3.036.099	4.564.241

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara keseluruhan sebesar Rp. 154.902.360, nilai MPC-nya sebesar **17,63** dan nilai APC-nya sebesar **26,5**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya sebesar **0,59** dan nilai APC-nya sebesar **0,88**.

b. PNS Golongan III

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik PNS Golongan III Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
**Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Fisik PNS Golongan III
 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan III

Pendapatan		Konsumsi Fisik						
2016	2017	2016	2017	APC-KF	MPC-KF	Basic-KF	Marginal-KF	Total-KF
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
136.479.480	140.192.480	119.908.170	121.099.354	17,25	10,25	48.790.254	72.309.100	121.099.354

Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Keseluruhan

Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Rata-Rata								
6.823.974	7.009.624	5.995.409	6.054.968	0,86	0,51	2.439.513	3.615.455	6.054.968

Sumber: Data primerdiolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 140.192.480, nilai MPC-nya sebesar **10,25** dan nilai APC-nya sebesar **17,25**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,51** dan nilai APC-nya sebesar **0,86**.

c. PNS Golongan IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik PNS Golongan IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.15 berikut:



Tabel 4.15

**Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Fisik PNS Golongan IV
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV

Pendapatan		Konsumsi Fisik						
2016	2017	2016	2017	APC-KF	MPC-KF	Basic-KF	Marginal-KF	Total-KF
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Keseluruhan								
54.032.208	55.353.008	43.882.457	43.865.912	4,75	3,08	15.459.668	28.406.244	43.865.912
Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Rata-Rata								
9.005.368	9.225.501	7.303.053	7.296.603	0,79	0,51	2.576.611	4.743.347	7.310.985

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara keseluruhan sebesar Rp. 55.353.008, nilai MPC-nya sebesar **3,08** dan nilai APC-nya sebesar **4,75**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya sebesar **0,51** dan nilai APC-nya sebesar **0,79**.

d. PNS Golongan II-IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik PNS Golongan II-IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.16 berikut:



Tabel 4.16

**Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Fisik PNS Golongan II-IV
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV

Pendapatan		Konsumsi Fisik		APC-KF	MPC-KF	Basic-KF	Marginal-KF	Total-KF
2016	2017	2016	2017	%	%	%	(Rp)	(Rp)
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)					
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Keseluruhan								
341.291.648	350.447.848	299.658.869	301.892.495	48,51	30,95	110.094.170	191.798.325	301.892.495
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Rata-Rata								
6.094.494	6.257.997	5.351.051	5.390.937	0,87	0,55	1.965.967	3.424.970	5.390.937

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara keseluruhan sebesar Rp. 350.447.848, nilai MPC-nya sebesar **30,95** dan nilai APC-nya sebesar **48,51**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,55** dan nilai APC-nya sebesar **0,87**.

Uraian tersebut di atas menandakan bahwa nilai MPC pada konsumsi fisik PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan semakin kecil ketika pendapatan mereka meningkat. Artinya, penambahan konsumsi fisik mereka tidak naik meskipun pendapatan mereka terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa jika mereka semakin makmur dan adil, maka porsi penambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi fisik tidak dinaikkan, sehingga kemampuan mereka untuk menabung meningkat. Jika demikian adanya, maka kemampuan mereka untuk menyediakan dana investasi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang juga meningkat. Dengan demikian, MPC pada konsumsi fisik bagi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang berpenghasilan tinggi, lebih rendah tingkat MPC-nya dari PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang berpenghasilan rendah.



Sedangkan nilai APC-nya juga mengalami penurunan meskipun rata-rata konsumsi mereka tetap karena pendapatan mereka naik. Tingkat APC digunakan untuk mengetahui rasio perbandingan antara besarnya tingkat konsumsi fisik yang dikeluarkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada berbagai tingkat pendapatan yang mereka miliki dengan tingkat pendapatan mereka itu sendiri. Atas dasar ini, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa dana yang dikeluarkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk konsumsi fisiknya tetap meskipun tingkat pendapatan mereka naik. Artinya tingkat rata-rata konsumsi fisiknya sudah stabil dan tidak ditambah lagi meskipun ada kesempatan dan dana yang bisa digunakan untuk menambahnya karena naiknya tingkat pendapatan mereka. Akan tetapi dana tersebut disiapkan untuk tabungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menyiapkan dana investasi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang.

2. Tingkat APC dan MPC pada Pembayaran Zakat

a. PNS Golongan II

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada pembayaran zakat PNS Golongan II Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
**Tingkat APC dan MPC pada Pembayaran Zakat PNS Golongan II
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Pendapatan		Pembayaran Zakat		APC-PZ	MPC-PZ
2016	2017	2016	2017		
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Keseluruhan					
150.779.960	154.902.360	3.391.388	3.484.406	0,68	0,68
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Rata-Rata					
5.025.999	5.163.412	113.046	116.147	0,03	0,03

Sumber: Data primer diolah 2018.



Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara keseluruhan sebesar Rp. 154.902.360, nilai MPC-nya sebesar **0,68** dan nilai APC-nya sebesar **0,68**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**.

b. PNS Golongan III

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada pembayaran zakat PNS Golongan III Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
**Tingkat APC dan MPC pada Pembayaran Zakat PNS Golongan III
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

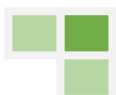
Rata-Rata Tingkat Pendapatan Golongan III					
Pendapatan		Pembayaran Zakat		APC-PZ	MPC-PZ
2016	2017	2016	2017	%	%
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%
Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Keseluruhan					
136.479.480	140.192.480	3.411.987	3.504.812	0,50	0,50
Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Rata-Rata					
6.823.974	7.009.624	170.599	175.241	0,03	0,03

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 140.192.480, nilai MPC-nya sebesar **0,50** dan nilai APC-nya sebesar **0,50**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**.

c. PNS Golongan IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada pembayaran zakat PNS Golongan IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat



disajikan pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19
**Tingkat APC dan MPC pada Pembayaran Zakat PNS Golongan IV
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan Golongan IV					
Pendapatan		Pembayaran Zakat		APC-PZ	MPC-PZ
2016	2017	2016	2017		
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%
Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Keseluruhan					
54.032.208	55.353.008	1.350.805	1.383.825	0,15	0,15
Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Rata-Rata					
9.005.368	9.225.501	225.134	230.638	0,03	0,03

Sumber: Data primer diolah 2018.

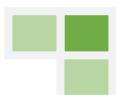
Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara keseluruhan sebesar Rp. 55.353.008, nilai MPC-nya sebesar **0,15** dan nilai APC-nya sebesar **0,15**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**.

d. PNS Golongan II-IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada pembayaran zakat PNS Golongan II-IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20
**Tingkat APC dan MPC pada Pembayaran Zakat PNS Golongan II-IV
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan Golongan II-IV					
Pendapatan		Pembayaran Zakat		APC-PZ	MPC-PZ
2016	2017	2016	2017		



(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Keseluruhan					
341.291.648	350.447.848	8.154.180	8.373.043	1,33	1,33
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Rata-Rata					
6.094.494	6.257.997	145.610	149.519	0,03	0,03

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara keseluruhan sebesar Rp. 350.447.848, nilai MPC-nya sebesar **1,33** dan nilai APC-nya sebesar **1,33**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**.

Uraian tersebut di atas menandakan bahwa nilai MPC pada pembayaran zakat maal PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada setiap tingkat pendapatan yang mereka miliki adalah sama, yakni nilainya konstan. Artinya, pembayaran zakat maal bagi mereka adalah suatu kewajiban yang sudah ditetapkan secara pasti dalam Islam dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Oleh karena itu, bagi mereka tentang pembayaran zakat maal wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan demikian, PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat maal, maka mereka akan menunaikannya dengan baik dan benar.

3. Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Ibadah Lain

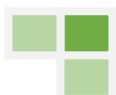
a. PNS Golongan II

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi ibadah lain PNS Golongan II Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21

Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Ibadah Lain PNS Golongan II Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan II



Pendapatan		Konsumsi Ibadah Lain		APC-IL	MPC-IL	Basic-IL	Marginal-IL	Total-IL
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Keseluruhan								
150.779.960	154.902.360	11.520.330	12.757.765	2,47	12,63	45.844.249	58.602.014	12.757.765
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Rata-Rata								
5.025.999	5.163.412	384.011	425.259	0,08	0,42	1.528.142	1.953.400	425.259

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara keseluruhan sebesar Rp. 154.902.360, nilai MPC-nya sebesar **12,63** dan nilai APC-nya sebesar **2,47**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya sebesar **0,42** dan nilai APC-nya sebesar **0,08**.

b. PNS Golongan III

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi ibadah lain PNS Golongan III Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22
**Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Ibadah Lain PNS Golongan III
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan III

Pendapatan		Konsumsi Ibadah Lain		APC-IL	MPC-IL	Basic-IL	Marginal-IL	Total-IL
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Keseluruhan								
136.479.480	140.192.480	13.159.323	13.358.975	1,92	8,44	48.790.254	62.149.229	13.358.975



Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Rata-Rata

6.823.974	7.009.624	657.966	667.949	0,10	0,42	2.439.513	3.107.461	667.949
-----------	-----------	---------	----------------	------	------	-----------	-----------	----------------

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 140.192.480, nilai MPC-nya sebesar **8,44** dan nilai APC-nya sebesar **1,92**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,42** dan nilai APC-nya sebesar **0,10**.

c. PNS Golongan IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi ibadah lain PNS Golongan IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23
**Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Ibadah Lain PNS Golongan IV
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV

Pendapatan		Konsumsi Ibadah Lain		APC-IL	MPC-IL	Basic-IL	Marginal-IL	Total-IL
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)

Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Keseluruhan

54.032.208	55.353.008	8.798.946	7.704.844	0,84	9,12	15.459.668	23.164.512	7.704.844
------------	------------	-----------	------------------	------	------	------------	------------	------------------

Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Rata-Rata

9.005.368	9.225.501	1.466.491	1.284.141	0,14	1,52	2.576.611	3.860.752	1.284.141
-----------	-----------	-----------	------------------	------	------	-----------	-----------	------------------

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara keseluruhan sebesar Rp. 55.353.008, nilai MPC-nya sebesar **9,12** dan nilai APC-nya sebesar **0,84**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara



rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya sebesar **1,52** dan nilai APC-nya sebesar **0,14**.

d. PNS Golongan II-IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada konsumsi ibadah lain PNS Golongan II-IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24

**Tingkat APC dan MPC pada Konsumsi Ibadah Lain PNS Golongan II-IV
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

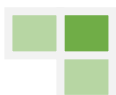
Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV

Pendapatan		Konsumsi Ibadah Lain		APC-IL	MPC-IL	Basic-IL	Marginal-IL	Total-IL
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Keseluruhan								
341.291.648	350.447.848	33.478.598	33.821.584	5,24	30,20	110.094.170	143.915.755	33.821.584
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Rata-Rata								
6.094.494	6.257.997	597.832	603.957	0,09	0,54	1.965.967	2.569.924	603.957

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara keseluruhan sebesar Rp. 350.447.848, nilai MPC-nya sebesar **30,20** dan nilai APC-nya sebesar **5,24**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,54** dan nilai APC-nya sebesar **0,09**.

Uraian tersebut di atas menandakan bahwa nilai MPC pada konsumsi ibadah (selain zakat maal) PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan semakin besar ketika pendapatan mereka meningkat. Artinya, penambahan konsumsi ibadah mereka selain zakat maal, semakin naik apabila pendapatan mereka terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa jika mereka semakin makmur dan adil, maka porsi penambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi ibadah makin bertambah pula. Artinya PNS



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan senang beribadah.

Sedangkan nilai APC-nya juga mengalami kenaikan. Tingkat APC digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat konsumsi ibadah yang dikeluarkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat pendapatan yang mereka miliki. Atas dasar ini, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa dana yang dikeluarkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk konsumsi ibadahnya juga naik. Artinya tingkat rata-rata konsumsi ibadah mereka selain zakat maal senantiasa bertambah karena mereka melihat ibadah itu sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam hidup, khususnya aspek rohaniyah.

4. Kesyariahan Perilaku Konsumsi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk mengukur kesyariahan perilaku konsumsi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dengan membandingkan antara porsi konsumsi pokok untuk pribadi dengan porsi konsumsi pokok untuk ibadah mereka pada setiap tingkat pendapatan yang mereka miliki, digunakan model konsumsi Fahmin Khan. Persamaan matematisnya, yaitu: $C = (a_0 + E_2) + a_1 (Y_u - E_2)$. Hasil perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut:

1. PNS Golongan II

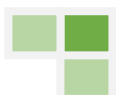
Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada kesyariahan perilaku konsumsi PNS Golongan II Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.25 berikut:

Tabel 4.25
Tingkat APC dan MPC pada Kesyariahan Perilaku Konsumsi PNS Golongan II Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan II

Pendapatan		Konsumsi Riil		APC-KR	MPC-KR	E ₁	E ₂	Basic-KR
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
150.779.960	154.902.360	135.868.242	136.927.230	26,52	17,63	45.844.249	16.242.171	62.086.420

Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Keseluruhan



Tingkat Pendapatan PNS Golongan II Secara Rata-Rata

5.025.999	5.163.412	4.528.941	4.564.241	0,88	0,59	1.528.142	541.406	2.069.547
-----------	-----------	-----------	------------------	------	------	------------------	----------------	-----------

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu:

- Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara keseluruhan sebesar Rp. 154.902.360, nilai MPC-nya sebesar **17,63** dan nilai APC-nya sebesar **26,52**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya sebesar **0,59** dan nilai APC-nya sebesar **0,88**.
- Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara keseluruhan sebesar Rp. 154.902.360, nilai E_1 -nya sebesar Rp. 45.844.249 dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. 16.242.171. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai E_1 -nya sebesar Rp. 1.528.142 dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. 541.406.

2. PNS Golongan III

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada kesyariahan perilaku konsumsi PNS Golongan III Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.26 berikut:

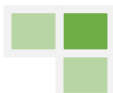
Tabel 4.26

Tingkat APC dan MPC pada Kesyariahan Perilaku Konsumsi PNS Golongan III Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan III

Pendapatan		Konsumsi Riil						
2016	2017			APC-KR	MPC-KR	E_1	E_2	Basic-KR
(Rp)	(Rp)	2016	2017	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Keseluruhan								
136.479.480	140.192.480	119.908.170	121.099.354	17,25	10,25	48.790.254	16.863.787	65.654.041
Tingkat Pendapatan PNS Golongan III Secara Rata-Rata								
6.823.974	7.009.624	5.995.409	6.054.968	0,86	0,51	2.439.513	843.189	3.282.702

Sumber: Data primer diolah 2018.



Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu:

- a. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 140.192.480, nilai MPC-nya sebesar **10,25** dan nilai APC-nya sebesar **17,25**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,51** dan nilai APC-nya sebesar **0,86**.
- b. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 140.192.480, nilai E₁-nya sebesar Rp.48.790.254 dan nilai E₂-nya sebesar Rp. 16.863.787. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai E₁-nya sebesar Rp. 2.439.513 dan nilai E₂-nya sebesar Rp. 843.189.

3. PNS Golongan IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada kesyariahan perilaku konsumsi PNS Golongan IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.27 berikut:

Tabel 4.27
**Tingkat APC dan MPC pada Kesyariahan Perilaku Konsumsi PNS
Golongan IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan**

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV

Pendapatan		Konsumsi Riil						
2016	2017	2016	2017	APC-KR	MPC-KR	E ₁	E ₂	Basic-KR
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Keseluruhan								
54.032.208	55.353.008	1.350.805	1.383.825	0,15	3,08	15.459.668	9.088.669	24.548.337
Tingkat Pendapatan PNS Golongan IV Secara Rata-Rata								
9.005.368	9.225.501	225.134	230.638	0,03	0,51	2.576.611	1.514.778	4.091.390

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu:

- a. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 55.353.008, nilai MPC-nya sebesar **3,08** dan nilai APC-nya sebesar **0,15**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya



sebesar **0,51** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**.

- b. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara keseluruhan sebesar Rp. 55.353.008, nilai E_1 -nya sebesar Rp. 2.576.611 dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. 1.514.778. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai E_1 -nya sebesar Rp. 2.576.611 dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. 1.514.778.

4. PNS Golongan II-IV

Hasil perhitungan tingkat APC dan MPC pada kesyariahan perilaku konsumsi PNS Golongan II-IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disajikan pada tabel 4.28 berikut:

Tabel 4.28
Tingkat APC dan MPC pada Kesyariahan Perilaku Konsumsi PNS Golongan II-IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-Rata Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV

Pendapatan		Konsumsi Riil		APC-KR	MPC-KR	E_1	E_2	Basic-KR
2016	2017	2016	2017					
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	%	(Rp)	(Rp)
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Keseluruhan								
341.291.648	350.447.848	299.658.869	301.892.495	48,51	30,95	110.094.170	42.194.627	152.288.797
Tingkat Pendapatan PNS Golongan II-IV Secara Rata-Rata								
6.094.494	6.257.997	5.351.051	5.390.937	0,87	0,55	1.965.967	753.475	2.719.443

Sumber: Data primer diolah 2018.

Hal-hal yang dapat dijelaskan pada tabel di atas, yaitu:

- a. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara keseluruhan sebesar Rp. 350.447.848, nilai MPC-nya sebesar **30,95** dan nilai APC-nya sebesar **48,51**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,55** dan nilai APC-nya sebesar **0,87**.
- b. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara keseluruhan sebesar Rp. 350.447.848, nilai E_1 -nya sebesar Rp. 110.094.170 dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. 42.194.627. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp.



6.257.997, nilai E_1 -nya sebesar Rp. 1.965.967 dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. 753.475.

Terkait dengan tingkat MPC pada uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai MPC pada konsumsi pokok untuk pribadi PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan semakin kecil ketika pendapatan mereka meningkat. Artinya penambahan konsumsi pokok untuk pribadi mereka tidak naik meskipun pendapatan mereka naik. Hal ini menandakan bahwa jika mereka semakin makmur dan adil.

Sedangkan nilai APC-nya juga mengalami penurunan, artinya rata-rata konsumsi pokok untuk pribadi mereka tetap meskipun pendapatan mereka naik. Tingkat APC digunakan untuk mengetahui rasio perbandingan antara besarnya tingkat dana konsumsi pokok untuk pribadi yang dikeluarkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada berbagai tingkat pendapatan yang mereka miliki dengan tingkat pendapatan mereka itu sendiri. Atas dasar ini, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa dana yang dikeluarkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada konsumsi pokok untuk pribadi mereka tidak ditambah karena sudah dianggap stabil oleh mereka meskipun tingkat pendapatan mereka naik. Artinya, mereka mengalokasikan porsi dana yang lebih besar pada konsumsi pokok untuk pribadi daripada konsumsi pokok untuk ibadah meskipun ada kesempatan dan dana yang bisa digunakan untuk menambah konsumsi pokok untuk ibadahnya karena naiknya tingkat pendapatan mereka. Akan tetapi dana tersebut disiapkan untuk kepentingan dan kegiatan pribadi.

Terkait dengan tingkat E_1 dan E_2 pada tingkat pendapatan secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa porsi dana yang disiapkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada konsumsi pokok untuk ibadah mereka. Pada saat tingkat pendapatan mereka secara keseluruhan PNS Golongan II sebesar Rp. 154.902.360, nilai E_2 -nya lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 16.242.171 < E_1 , Rp. 45.844.249). Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III sebesar Rp. 136.479.480, nilai E_2 -nya juga lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 16.863.787 < E_1 , Rp. 48.790.254). Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV sebesar Rp. 55.353.008, nilai E_2 -nya juga lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 9.088.669 < E_1 , Rp. 15.459.668). Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV sebesar Rp. 350.447.848, nilai E_2 -nya juga lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 42.194.627 < E_1 , Rp. 110.094.170).

Sedangkan terkait dengan tingkat E_1 dan E_2 pada tingkat pendapatan PNS rata-rata dapat dijelaskan bahwa porsi dana yang disiapkan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada konsumsi pokok untuk pribadi lebih besar dari



porsi dana yang disiapkan untuk konsumsi pokok untuk ibadah mereka. Pada saat tingkat pendapatan mereka secara rata-rata PNS Golongan II sebesar Rp. 5.163.412, nilai E_2 -nya lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 541.406 < E_1 , Rp. 1.528.142). Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III sebesar Rp. 7.009.624, nilai E_2 -nya juga lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 843.189 < E_1 , Rp. 2.439.513). Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV sebesar Rp. 9.225.501, nilai E_2 -nya juga lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 1.514.778 < E_1 , Rp. 2.576.611). Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV sebesar Rp. 6.257.997, nilai E_2 -nya juga lebih kecil dari nilai E_1 -nya (E_2 , Rp. 753.475 < E_1 , Rp. 1.965.967). Artinya, ukuran pembelanjaan harta yang dilakukan oleh PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan belum sesuai yang digariskan oleh tujuan syariat Islam. Mereka lupa bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Harta bukanlah tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai masalah.

D. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat APC dan MPC pada konsumsi fisik, pembayaran zakat dan ibadah lain PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk konsumsi fisik, pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya sebesar **0,59** dan nilai APC-nya sebesar **0,88**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,51** dan nilai APC-nya sebesar **0,86**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya sebesar **0,51** dan nilai APC-nya sebesar **0,79**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,55** dan nilai APC-nya sebesar **0,87**. Untuk pembayaran zakat, pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,03** dan nilai APC-nya sebesar **0,03**. Untuk konsumsi ibadah lain, pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai MPC-

nya sebesar **0,42** dan nilai APC-nya sebesar **0,08**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai MPC-nya sebesar **0,42** dan nilai APC-nya sebesar **0,10**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai MPC-nya sebesar **1,52** dan nilai APC-nya sebesar **0,14**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai MPC-nya sebesar **0,54** dan nilai APC-nya sebesar **0,09**.

2. Tingkat kesyariahan perilaku konsumsi rumah tangga Pegawai Negeri Sipil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat konsumsi pokok (a_0) pada konsumsi pribadi (E_1) dan ibadah (E_2) PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan jika diukur dengan model konsumsi Fahim Khan, maka didapatkan hasil, yakni: Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II secara rata-rata sebesar Rp. 5.163.412, nilai E_1 -nya sebesar Rp. **1.528.142** dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. **541.406**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan III secara rata-rata sebesar Rp. 7.009.624, nilai E_1 -nya sebesar Rp. **2.439.513** dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. **843.189**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan IV secara rata-rata sebesar Rp. 9.225.501, nilai E_1 -nya sebesar Rp. **2.576.611** dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. **1.514.778**. Pada tingkat pendapatan PNS Golongan II-IV secara rata-rata sebesar Rp. 6.257.997, nilai E_1 -nya sebesar Rp. **1.965.967** dan nilai E_2 -nya sebesar Rp. **753.475**. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan belum syariah dalam perilaku konsumsinya karena konsumsi ibadahnya lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi pokoknya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya memberikan kompensasi yang layak kepada pegawainya sehingga mereka bisa memenuhi tingkat konsumsinya baik APC maupun MPC-nya. Jika tingkat konsumsi tersebut terpenuhi dengan baik, mereka merasa disejahterakan oleh lembaganya, dan hal ini akan berdampak kepada kualitas kinerja mereka.
2. Bagi para PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, hendaknya dapat mewujudkan lima tujuan syariat Islam dalam memenuhi setiap kegiatan konsumsinya. Jika mereka dapat mewujudkan lima tujuan syariat Islam dalam memenuhi setiap kegiatan konsumsinya maka akan tercipta keseimbangan aktivitas di PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian juga, harus disiplin

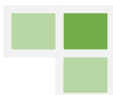
dalam menepati skala prioritas kebutuhannya, sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Karena syariat Islam tidak menganjurkan, bahkan mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah, karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasan.

Referensi

- Amir, Amri “Pola dan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim di Provinsi Jambi (Telaah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Keimanan)”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 4. No. 2. 2016.
- Arif, Nur Rianto Al. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. t.c; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. t.c; Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005.
- Bilson, Simamora. *Riset Pemasaran*. t.c; Jakarta: Gramedia Utama. 2004.
- Boediono. *Ekonomi Makro*. Edisi Keempat; Cet. XXIX; Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2018.
- Boediono. *Pengantar Ekonomi*. t.c; Jakarta: Erlangga. 2002.
- Danil, Mahyu. “Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*. Vol. IV. No. 7. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. t.c; Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.c; Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Dumairy. *Sistem Ekonomi Indonesia*. t.c; Jakarta: Erlangga. 1996.
- Engel, J.F. *Consumer Behavior*. Jilid 1; Alih Bahasa: Budiyanto; t.c; Jakarta: Binarupa Aksara. 1994.
- Euis, Amalia dan Nur Rianto Al-Arif. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. t.c; Jakarta: Kencana. 2010.
- Fausia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Hasanah, Erni Umi dan Danang Suryanto. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (Teori & Soal)*. Cet. I; Yogyakarta: CAPS Publishing. 2014.



- Hidayat, Mohammad. *An Introduction The Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim. 2010.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. t.c; Jakarta: Kencana. 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*. t.c; Bandung: Sygma Examedia Arkanleema. 2010.
- Khan, Fahim. *Essays in Islamic Economics*. Leceister: The Islamic Foundantion. 1995.
- "An Alternative Approach to Analysis of Consumer Behavior: Need for Distinctive "Islamic" Theory". *Journal of Islamic Bussiness and Management*. Vol. 3. No. 2. 2013.
- Lawrence, W. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Sofia Edina. Ed. VII; t.c; Jakarta: Indeks. 2013.
- Mappiere, Andi. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*. t.c; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. t.c; Jakarta: Sinar Harapan. 2003.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. t.c; Jakarta: LP3ES. 2003.
- Raharja, Prathama & Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. t.c; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008.
- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. t.c; Jakarta: Bina Grafika. 2004.
- Sadono, Sukirno. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. t.c; Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Samuelson, Paul A dan William D Nordhaus. *Ilmu Makro Ekonomi*. t.c; Jakarta: Media Edukasi. 2004.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. t.c; Jakarta: Kencana. 2003.
- Soeharno. *Teori Mikro Ekonomi*. t.c; Yogyakarta: Andi. 2007.
- Soekartawi. *Faktor-Faktor Produksi*. t.c; Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ed. I; Cet. III; Yogyakarta; Ekonisia. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cet. XX; Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. t.c; Bandung: Alfabeta. 2013.



- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi (Teori Pengantar)*. Ed. III; t.c; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Syaparuddin, “Menakar Kesyariahan Prilaku Konsumsi Karyawan Lembaga Keuangan Syariah dengan Model Konsumsi Fahmin Khan (Studi pada Karyawan BMT As’Adiyah Sengkang)”. *Penelitian Individual Dosen*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Watampone. 2017.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Ed. I; Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Tim Penyusun Profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. 2017.
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. t.c; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

